

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya dalam “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan menggunakan metode analisis *Ordinary Least Square (OLS)*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dari variabel Industri (X1) menyatakan bahwa Jumlah Industri berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah industri berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Karena penyerapan tenaga kerja di DIY masih dominan pada sektor pertanian daripada sektor industri yang kecil penyerapan ketenagakerjaannya, maka kenaikan jumlah Industri di DIY tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, karena penyerapannya tidak berasal dari sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.
2. Berdasarkan hasil analisis dari variabel Tingkat upah (X2) menyatakan bahwa Tingkat upah berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah pengangguran. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Tingkat upah berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah pengangguran. Karena jika Tingkat upah meningkat maka jumlah penyerapan tenaga kerja akan ikut meningkat dan jumlah pengangguran akan turun. Sebaliknya jika Tingkat upah berkurang maka jumlah

penyerapan tenaga kerja akan turun karena para pencari kerja yang menginginkan upah tinggi, dan pengangguran akan meningkat.

3. Berdasarkan hasil analisis dari variabel TPAK (X3) menyatakan bahwa TPAK berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa TPAK berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah pengangguran. Karena ketika TPAK meningkat maka kesempatan kerja akan meningkat, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup untuk menampung banyaknya tenaga kerja yang ada, sehingga pengangguran akan naik. Begitu pula sebaliknya, ketika TPAK turun maka pengangguran akan turun, karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya angkatan kerja yang ada, karena jumlah pengangguran bergantung kepada jumlah angkatan kerja yang ada dan lowongan kerja yang tersedia. Semisal tingkat partisipasi angkatan kerja turun tetapi lowongan kerja tetap, maka pengangguran akan turun.
4. Berdasarkan hasil analisis dari variabel IPM (X4) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah pengangguran. Karena ketika tingkat IPM meningkat yang artinya banyak tenaga kerja yang berkualifikasi tinggi dan berkemampuan tinggi maka akan mampu untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi bahkan mampu untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja baru yang dapat mengurangi jumlah

pengangguran, sebaliknya jika IPM turun maka pengangguran akan naik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya angkatan kerja baru yang kurang memiliki kualifikasi yang baik untuk masuk dalam sebuah perusahaan, sehingga pengangguran akan naik.

5.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang sudah didapatkan dari hasil penelitian ini, penulis membuat beberapa saran untuk pemerintah dan juga penelitian selanjutnya yakni:

1. Pemerintah hendaknya dapat memanfaatkan sektor industri yang ada di DIY semaksimal mungkin agar dapat memangkas pengangguran, dan para tenaga kerja yang tadinya masih dominan bekerja di sektor pertanian mulai beralih ke sektor industri.
2. Pemerintah hendaknya memperhatikan kualitas Angkatan kerja yang sudah ada, karena banyaknya angkatan kerja yang tidak berkualifikasi tinggi akan menyulitkan mereka dalam mencari lapangan perkerjaan.
3. Diperlukannya program pemerintah untuk meningkatkan pekerja, misalnya dengan membuka lembaga pendidikan yang dapat membimbing para tenaga kerja dalam mencari pekerjaan yang tepat (*Right man on the right job*).
4. Pemerintah daerah harus mampu mengkalkulasi secara efektif dan efisien berapa kira-kira besaran UMR (Upah Minimum Regional) secara netral tanpa mengorbankan salah satu pihak yakni antara kaum buruh dengan para pengusaha. Dampaknya akan terlihat bagi perekonomian daerah dan

bahkan bisa mengganggu stabilitas perekonomian pusat dan akan menyebabkan terganggunya perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dalam penetapan Upah Minimum Regional harus berdasarkan pada hasil survey KLH (Kebutuhan Hidup Layak) yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral lainnya.

5. Bagi peneliti selanjutnya dalam pengambilan data diharapkan lebih baik lagi dan menggunakan analisis yang berbeda.

